LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN MARET DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Jumat, 5 April 2024

B. Pimpinan Rakor

Kepala DInas

C. Peserta Rakor

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang
4. Kepala Sub Bagian
5. Sub Koordinator
6. Bendahara Pembantu
7. Bendahara Pelaksana Pembantu
8. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
9. Pelaksanan pada masing-masing unit kerja

D. Notulis

Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 19,65 %

b. Keuangan = 4.451.242.841 (19,90%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19.660.000			0		
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	19.660.000	25,43	0	0	(25,43)	Menyesuaikan kebutuhan
Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000			15.715.000		
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.680.000	22,71	18,53	6.055.000	(4,18)	
2	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	67.320.000	14,96	14,35	9.660.000	(0,61)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.800.000			5.443.000		

1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.800.000	9,90	5,99	5.443.000	(3,91)	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan							
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	15.400.000			0		
1	Workshop Tim Teknis PUG	15.400.000	61,04	0	0	(61,04)	Pelaksanaan diundur di TW 2
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	44.320.000			3.942.000		
1	Konsultasi PUG	44.320.000	23,33	22,74	3.942.000	(0,59)	Realisasi Keuangan disesuaikan dengan kebutuhan Perjalanan Dinas.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak							
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi							
	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	17.200.000			6.100.000		
1	Koordinasi dan Pemantauan Capaian Pengembangan KLA	17.200.000	41,28	35,47	6.100.000	(5,81)	honor narsum untuk rakor kabupaten kota, sebagian akan dialihkan untuk narsum saat rakor dengan tim VA provinsi
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi	14.500.000			14.324.000		
1	Pelaksanaan Penyediaan Bantuan Kebutuhan Khusus bagi AMPK	14.500.000	100	98,79	14.324.000	(1,21)	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera							
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	58.844.000			25.591.580		
1	Sosialisasi Penurunan Angka Stunting Melalui Kelompok BKB	58.844.000	45,65	43,48	25.591.580	(2,17)	
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							

	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	44.347.000			0		
1	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Produk dan Jaringan Usaha Kelompok UPPKA	44.347.000	6,88	0	0	(6,88)	Menyesuaikan kebutuhan
	Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	10	0	0			
	Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	0	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

1. Pergeseran anggaran DWP untuk Bazar
2. DRPPA tidak bisa relawan SAPA di tingkat Desa
3. Belum ada regulasi terkait permen PPA dan roadmap lanjutan dari kemenaker terkait penanganan dan pencegahan pekerja anak
4. Data bullying dan data pekerja anak belum ada
5. Masih banyak OPD yang belum mengirimkan GAP/GBS
6. Beberapa OPD belum bisa memberikan minimal 10% total belanja mereka
7. Belum semua kab/kota menyusun GDPK 5 pilar
8. Belum optimalnya integrasi DRPPA pada kampung KB
9. KB non MKJP lebih tinggi dari MKJP

Upaya

1. Koordinasi untuk pergeseran anggaran DWP
2. Pembentukan Fasda DRPPA dilaksanakan ditingkat Kabupaten
3. Melakukan beberapa kali FGD ditingkat provinsi dan mengundang 5 kab/kota yang jumlah pekerja anak tertinggi
4. Sudah ada pilot project di Wonosobo untuk penanganan dan pencegahan pekerja anak, yang diinisiasi Kementeriaan PPPA bekerjasama dengan LSM JARAK
5. Pendampingan dan advokasi OPD
6. Advokasi pada kab/kota yang belum menyusun GDPK 5 pilar
7. Advokasi linsek untuk optimalisasi integrasi DRPPA pada Kampung KB
8. Penggerakan KB MKJP

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1. Kegiatan Advokasi dan implementasi GSIB dalam penurunan AKI dan AKB di 3 Kabupaten (Magelang, Kendal, Tegal)
2. Penguatan dan konsultasi kebijakan Perlindungan Perempuan di 2 lokasi
3. FGD Penyusunan Kebijakan Perlindungan Anak di Semarang (Pergub KLA)
4. Roadshow PUG Provinsi
5. Sosialisasi Pembangunan Kualitas Keluarga di desa dampingan
6. Dikpol di 3 titik
7. Penyusunan dokumen sistem informasi peringatan dini dalduk di Provinsi
8. Lomba implementasi kebijakan penyelenggaraan kampung di 6 lokasi
9. Sosialisasi Tribina dan UPPKA di Kampung KB (1 lokasi)
10. Sosialisasi PUG pada PSW dan PSG di 1 lokasi
11. Safari pelayanan KB di 6 titik

V. PENUTUP

Stressing Pengendalian

1. Masing-masing pimpinan pada unit kerja memantau indikator kinerja serta realisasi keuangan/fisiknya

Semarang, Jumat, 5 April 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Dra. RETNO SUDEWI, Apt,MSi,MM

NIP. 196811241993102001